

Tinjauan Buku:
Menerawang Indonesia: pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21[☆]

Lana Soelistianingsih^{a,*}

^aDepartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Menerawang Indonesia: pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-12 merupakan judul buku yang ditulis oleh Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D. –Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri– yang diluncurkan pada Selasa, 10 April 2012 lalu. Buku tersebut merupakan ‘hadiah’ pemikiran Pak Jatun yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekonom Indonesia yang *futuristic* dengan bauran pemikiran yang multidisiplin, tidak hanya melibatkan ekonomi-politik, tetapi juga keamanan dan sosial budaya.

Penulisan buku ini menggunakan metode *conjecture* yaitu analisis penerawangan secara kualitatif. Buku ini mencoba membuka pandangan bagaimana Indonesia di tahun 2030 mendatang dari aspek multidisiplin. Tahun tersebut dianggap sangat penting sebagai peluang terakhir Indonesia untuk tinggal landas. Indonesia akan berada di tengah-tengah bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara tahun 2010–2040.

Bonus demografi ini merupakan peluang yang tidak akan berulang kembali di masa de-

pan karena Indonesia masih mempunyai postur demografi yang paling menguntungkan dengan rasio ketergantungan penduduk usia produktif terhadap yang tidak produktif berada pada posisi yang terendah hingga tahun 2035. Dengan posisi demografi yang menguntungkan ini, semestinya Indonesia mampu masuk ke tahap perekonomian berikutnya dengan kekuatan pendukung utama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Buku ini menekankan pentingnya NKRI di tahun 2030 tersebut tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga sebagai jaminan kemajuan di Asia Pasifik.

Lukisan NKRI 2030 yang muncul diperkirakan akan merupakan sebuah gambaran "Big History", yang berupa hasil interaksi dari bermacam-macam unsur tematis yang dijumpai di dalam kehidupan Negara-Bangsa Indonesia sejak 1945, bahkan jauh sebelumnya –di bidang-bidang ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi, bahkan militer.

Ada tiga bahasan utama dalam buku tersebut, yaitu menerawang Indonesia dari peta global, kemudian dengan peta Indonesia, yang ketiga adalah melihat lakon Indonesia di masa depan terutama terkait peranannya di tengah negara-negara ASEAN. Pada bagian peta global, masa depan suatu Negara-Bangsa termasuk Indonesia tidak lepas dari 3 diktum yaitu diktum geografi, diktum demografi, dan diktum sejarah. Ketiganya merupakan ikatan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Ketiga diktum tersebut menjadi modal dasar yang akan menentukan apakah suatu Negara-Bangsa

[☆]Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. (2012). *Menerawang Indonesia: Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-12*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

*Alamat korespondensi: Gedung Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424. Email: soelistianingsih@yahoo.com

akan bertahan dan menjadi besar atau sebaliknya menjadi gagal (*failed states*).

Pada bagian kedua, buku ini mengupas bagaimana peta Indonesia dilihat dari ketiga diktum tersebut. Perkembangan reformasi/demokratisasi/desentralisasi sejak tahun 1998 dianggap sebagai "titik yang tidak mungkin balik" sebagai modal bagi Negara-Bangsa Indonesia untuk menjalani lakonnya yang dibahas pada bagian ketiga.

Buku ini merangkum aspek-aspek yang bersifat multidisiplin dengan membuka wawasan geografi, kependudukan, dan aspek sejarah masa lalu untuk membuka masa depan Indonesia, terutama untuk tahun 2030. Apakah Indonesia akan mampu melakukan lompatan ke masa depan atau dikenal sebagai tinggal landas.

Bagian Pertama – Peta Global

Dalam bahasan peta global terungkap bahwa setiap Negara-Bangsa pasti mengalami tantangan-tantangan atau cobaan-cobaan yang bisa datang dari segala penjuru. Ada lima tantangan yang biasanya muncul yaitu: 1) Tantangan yang berasal dari arah transformasi ekonomi terkait juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin cepat; 2) Tantangan yang berasal dari perubahan-perubahan global akibat perang ataupun gejolak internal; 3) Tantangan yang berasal dari transformasi kebudayaan ataupun pergesekan-pergesekan antar-agama-agama besar; 4) Tantangan yang berasal dari transformasi demografi di tingkat nasional, regional, ataupun global; dan 5) Tantangan yang berasal dari krisis ekologi yang bersifat mendasar.

Setiap Negara-Bangsa menginginkan suatu pencapaian dengan lompatan jauh ke depan dalam upaya akhir menyejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Pencapaian tersebut tidak bersifat garis lurus dan membutuhkan perencanaan ekonomi yang juga terkait dengan sistem ekonomi yang dianut.

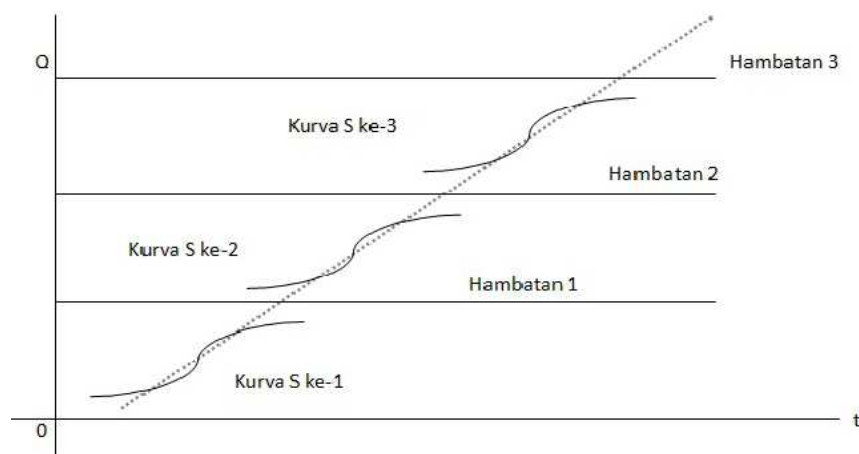
Perencanaan ekonomi dalam bentuk ekstrem dilakukan pertama kali oleh Lenin setelah ber-

hasil menggulingkan pemerintah Tsar di Rusia, kemudian berganti dengan pemerintahan Partai Komunis. *Leninisme* berbasis *Marxisme* mengambil bentuk pemerintahan yang totalitarisme dengan mengatasnamakan kepentingan dari kelas *Proletariat*. Pengubahan sistem pemerintahan ini dimaksudkan untuk mengubah secara mendasar keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat dan menghabisi feodalisme, serta kelas borjuis yang menopangnya. Selain Rusia, pemerintahan Italia dipimpin oleh Mussolini dan pemerintahan fasis di Jerman dengan pemimpin Hitler menggunakan perencanaan pembangunan nasional yang bersifat total.

Sementara itu, di negara-negara barat dipimpin oleh Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat (AS) juga mengadopsi perencanaan ekonomi namun berbasis Keynes yaitu menerapkan kebijakan intervensi pemerintah untuk membawa ekonomi AS kala itu keluar dari depresi besar dan permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masif.

Lompatan nasib ke depan dapat digambarkan dalam kurva S. Fase perekonomian akan mengalami tantangan dalam bentuk *structural limit*, di mana kenaikan pendapatan per kapita akan melambat dan berhenti pada suatu level tertentu. Pada saat itu, biasanya fase perekonomian mengalami tahapan krisis. Jika krisis 1 tersebut dapat dilalui, maka fase perekonomian akan melalui kurva S ke-2 sampai muncul hambatan ke-2 dengan keadaan krisis baru yang muncul, begitu seterusnya, sampai perekonomian tersebut melalui beberapa kurva S yang lebih tinggi. Pada negara yang berhasil akan menuju akselerasi, sedangkan Negara-Bangsa yang gagal, krisis akan membuat degenerasi, dan tertinggal oleh Negara-Bangsa yang sukses menuju akselerasi.

Dalam perkembangan perekonomian di abad ke-21 ini, saling keterkaitan antar-Negara-Bangsa membuat *degree of freedom* dari pengambil kebijakan menjadi terbatas. Dengan demikian, krisis yang terjadi di satu sektor bi-

Gambar 1: Pola Perkembangan Jangka-Panjang Pembangunan Ekonomi Suatu Negara-Bangsa

sa berubah menjadi krisis nasional sehingga diperlukan perubahan paradigma mengatasi krisis yang tidak bisa hanya fokus pada proyeksi-proyeksi ekonomi dan demografi karena proyeksi tersebut tidak mampu memprediksi kapan terjadinya krisis. Bahkan, apakah tindakan antisipasi krisis memerlukan pengakhiran dari sistem lama (*break with the past*), lembaga-lembaga lama, dan cara-cara lama termasuk proses perubahan politik.

Telah disinggung sebelumnya, tiga unsur besar (diktum) penentu nasib Negara-Bangsa adalah Geografi, Demografi, dan Sejarah. Diktum geografi merupakan bagian dari *life space* yang tidak saja bermakna pada kedaulatan wilayah nasional sebagaimana dijamin oleh berbagai konvensi internasional hingga Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi termasuk di dalamnya *air space* dan *outer space* sehingga batas dari *open sky* menjadi penting dalam mobilitas pengangkutan dengan pesawat udara. Tidak hanya sekadar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tetapi juga wilayah laut kedalaman (*deepsea*) yang merupakan landasan kontinental potensi konflik antar-Negara-Bangsa terkait dengan geografi sangat sering terjadi, seperti serangan Irak pada waktu Pre-

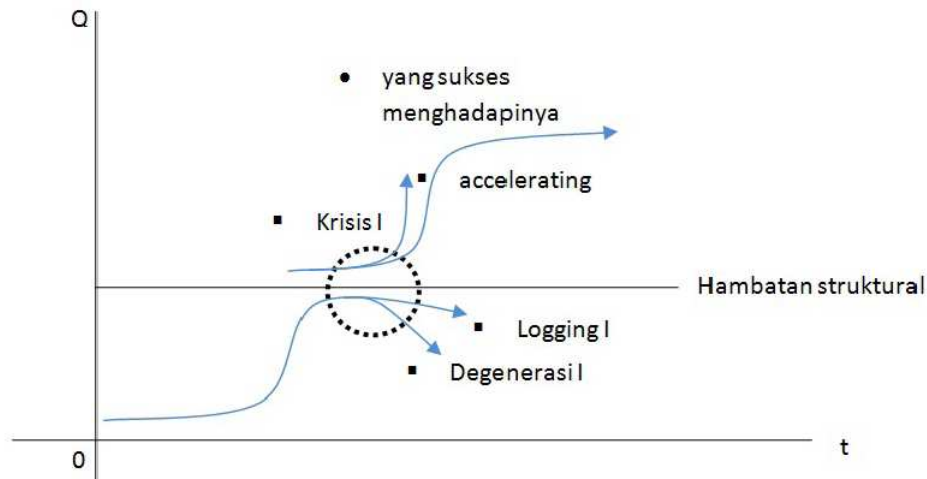
siden Saddam Hussein ke Kuwait atau persoalan di Timor Gap antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.

Pada akhirnya, setiap negara di dunia ini tidak akan berkompromi dalam hal mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan atas wilayahnya, dan kepentingan nasional yang menyangkut wilayah geografisnya dan potensi sumber daya alam (SDA) yang berada pada lokasi terkait, sejak lama hingga kini sekalipun.

Diktum kedua yaitu demografi. Diktum demografi diwakili oleh jumlah penduduk, struktur umur, tingkat kelahiran-kematian, jumlah angkatan kerja/tenaga kerja, dan faktor-faktor lainnya yang sejenis tidak dapat diubah dalam satu dasawarsa atau lebih termasuk di dalamnya adalah derajat kemajemukan dari penduduknya (pluralisme). Faktor demografi menjadi faktor penting penentu nasib Negara-Bangsa karena pada akhirnya faktor manusialah yang harus mengerjakan segala sesuatunya. Negara-Bangsa dengan kekuatan penduduk yang besar menjadi kekuatan untuk bertahan karena memiliki pasar domestik yang kuat.

Diktum ketiga yaitu sejarah, juga menjadi penentu perjalanan suatu Negara-Bangsa karena pada dasarnya kehidupan masyarakat ti-

Gambar 2: Beberapa Kemungkinan Pola Perkembangan Jangka-Panjang Pembangunan Ekonomi suatu Negara-Bangsa



tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat yang telah terkonsolidasikan di masa lalu. Sejarahwan membuktikan bahwa proses-proses tertentu di masyarakat merupakan kebiasaan lama yang kadang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya dalam kehidupan politik dan sistem pemerintahan. Berbeda dengan dua diktum sebelumnya, dalam diktum sejarah ditemukan proses yang tidak henti-hentinya menemukan apa yang disebut sebagai fakta-fakta sejarah di dalam kehidupan suatu Negara-Bangsa. Namun, ketiga diktum pada dasarnya saling terkait sebagai modal dasar membangun Negara-Bangsa untuk melakukan lompatan masa depan.

Bagian Kedua – Peta Indonesia

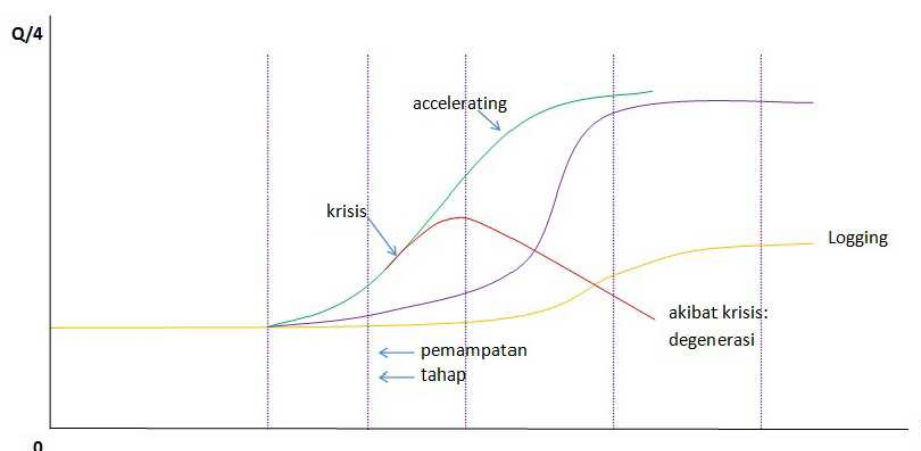
Pada bagian kedua ini, penerawangan mengenai Indonesia dimulai dari cara pandang Sumpah Pemuda, 1928. Sumpah Pemuda merupakan momen kebangkitan kesadaran berbangsa. Walaupun sangat terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran kebangkitan di dunia barat, tetapi kebangkitan kesadaran berbangsa justru merupakan kebangkitan perlawanan menghadapi kolonialisme yang didominasi oleh

bangsa-bangsa Barat.

Kongres Pemuda I tahun 1926 dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II tahun 1928 di kota Batavia telah mengusung 3 unsur diktum Negara-Bangsa yang penting sebagai landasan utama kehidupan berbangsa, serta bernegara yang modern. "Nusa" sebagai unsur geografi, "Bangsa" sebagai unsur demografi, dan konsep "Bahasa" sebagai pemersatu di dalam wujud bahasa nasional yang secara implisit mewakili diktum sejarah.

Di dalam peta Indonesia ini termuat bagaimana NKRI melakukan pencarian sistem politik dan sistem ekonomi. Keduanya terkait erat. Dalam pencarian sistem ekonomi yang dinilai cocok untuk membangun Indonesia menunjukkan bagaimana upaya pencarian tersebut ternyata banyak didikte oleh upaya pencarian sistem politik, dan oleh keputusan landasan normatif bagi kehidupan Negara-Bangsa. Dalam Skema D.1. di halaman 153, terdapat gambaran dari setiap periode sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut.

Pada periode 1945–1949, dengan sistem politik berbasis Parlementer, sistem ekonomi berada di bawah komando pemerintah yang me-

Gambar 3: Upaya Mempercepat Pembangunan dan Risiko yang Dapat Muncul

ngendalikan pemanfaatan semua milik Belanda yang dirampas.

Kemudian antara periode 1950–1959 dengan sistem politik berbasis Demokrasi Konstitusional, di saat yang sama dimulai sistem ekonomi berlandaskan pasar bebas yang terkendali.

Selanjutnya pada periode 1959–1966, RI dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan Presiden Sukarno membangun sistem politik Demokrasi Terpimpin dan sistem Ekonomi Terpimpin yang ditujukan membangun masyarakat Sosialis Indonesia. Akibat dari sistem politik yang diterapkan tersebut, sistem ekonomi dikembangkan dengan mengekspropriasi nasionalisasi semua milik asing, khususnya Belanda digunakan membangun landasan sistem ekonomi terpimpin. Sektor negara sebagai "*leading and commanding sector*".

Berikutnya, pada periode 1967–1998 Pemerintahan Orde Baru *c.q.*¹ ABRI menghabisi peranan PKI dan Sayap Kiri di seluruh sistem politik. Dengan menyertakan pelaksanaan Doktrin Dwi-Fungsi ABRI dilakukan proses depolitisasi dan penguasaan sistem "*floating mass*". Dalam periode yang sama, sistem ekonomi mengadopsi "*Nippon Inc*" pada swasta domestik dan asing dengan diberikan kele-

luasaan kembali dengan UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968. Bank Indonesia dan bank-bank BUMN digunakan untuk mendanai skim ini. Pada saat yang sama, kelompok teknokrat, dengan basis Bappenas membuat pengarah kebijakan pembangunan yang menyeluruh dengan menggunakan program repelita demi repelita.

Dan yang terakhir adalah periode 1999 hingga kini. Krisis ekonomi yang berat di tahun 1997/1998 menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan menciptakan gelombang pasang reformasi, yang diikuti demokratisasi, dan desentralisasi. Pempretelan kekuasaan di tingkat pusat menumbuhkan pusat-pusat kekuasaan baru seperti kekuatan DPR, kekuatan pemerintah daerah kabupaten/kota mengecilkan kekuasaan Gubernur. Proses politisasi bangkit kembali di semua bidang kehidupan. Sementara itu, di sistem ekonomi, konglomerat yang terimbas krisis, memperkuat peranan investor asing. Daya saing BUMN semakin memudar akibat proses korporatisasi.

Pencarian sistem ekonomi dalam kurun waktu pasca-kemerdekaan hingga kini menunjukkan ketidakkonsistensian dari para pengambil keputusan sehingga perlu adanya suatu desain ekonomi jangka panjang yang pada akhir-

¹casu quo/menurut hal, bilamana perlu.

nya terombang-ambing antara sistem komando dan sistem pasar. Seolah-olah seperti pencarian yang belum berhenti, suatu proses mencari sistem ekonomi yang tepat untuk Indonesia.

Tampaknya ke depan, penetapan sistem ekonomi-politik yang tepat dengan kondisi dan visi NKRI juga masih dalam pencarian. Sementara itu, gelombang globalisasi yang dimulai sejak tahun 1980-an, semakin mempersempit ruang gerak kebijakan (*policy space*) pengambil keputusan untuk dapat melakukan kebijakan yang mandiri. Setiap gejolak eksternal suka tidak suka akan membuat pengambil kebijakan di dalam negeri dalam melakukan manuver ekonomi semakin terbatas. Namun, krisis 1998 telah membawa NKRI masuk ke dalam fase kurva S yang baru, yang memungkinkan NKRI masuk ke dalam tahapan berikutnya yang lebih tinggi.

Pendekatan Multidisiplin

Indonesia ke depan bukanlah sekadar Indonesia dalam kacamata ekonomi saja, atau politik saja, atau satu disiplin saja yang menonjol, tetapi melihat Indonesia ke depan wajib melibatkan bauran pendekatan dari berbagai ilmu yang bersifat multidisiplin. Pendekatan multidisiplin ini akan dapat menciptakan proyeksi-proyeksi masa depan secara terintegrasi, tetapi tetap mempunyai uji validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan multidisiplin ini merupakan terobosan bahwa wilayah-wilayah di luar bidang ekonomi tidaklah *given* atau sering dikenal sebagai *ceteris paribus* dalam menganalisis kehidupan Negara-Bangsa. Dengan demikian, ruang gerak kebijakan (*policy space*) tersebut akan begitu luas dan melibatkan sejumlah besar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti misalnya proses politik dari penentuan anggaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)) adalah milik bersama yang diputuskan secara politik dan tidak sekadar berimplikasi ekonomi, tetapi lebih luas yaitu kehidupan Negara-Bangsa Indonesia. Legitimasi pemerintah yang

tinggi merupakan syarat mutlak untuk memperoleh *first-best choice* dalam proses *policy space*. Sebaliknya jika legitimasi pemerintah rendah, seperti yang biasa dijumpai pada negara gagal (*failed state*), maka ruang gerak kebijakan (*policy space*) akan terbatas dan tidak mungkin mendapatkan *first-best policy*.

Sejarah menunjukkan ada negara-negara kecil yang tenggelam menjadi '*failing states*' atau '*failed states*' sebagai akibat dari semakin meningkatnya persaingan antara negara demi kepentingan nasional masing-masing. Dengan demikian, bonus demografi yang dimiliki NKRI mestinya dikelola menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tanpa kualitas SDM tersebut, NKRI akan terhambat dari penciptaan kemajuan teknologi yang bisa membawa NKRI melakukan lompatan-lompatan dalam fase-fase pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk tinggal landas tersebut.

Oleh karenanya NKRI tidak akan mungkin menghindarkan diri ataupun menghindari pengaruh-pengaruh global, yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Hal ini terutama yang datang dari pergulatan rivalitas strategis di antara kekuatan-kekuatan raksasa, baik pada tataran global maupun regional.

Menyebut Indonesia sebagai Negara-Bangsa dalam kerangka NKRI merupakan tantangan untuk membuat keutuhan bangsa Indonesia dan menjadi faktor yang sangat penting. Membangun Indonesia adalah membangun idealisme ber-NKRI. Hal ini dikarenakan posisi NKRI dalam peta dunia khususnya di Asia Pasifik. Indonesia bersatu merupakan jaminan kemajuan Asia Pasifik.

Lakon Indonesia ke Depan

Dalam penerawangan terhadap lakon Indonesia di masa depan diperlukan pemahaman mengenai dimensi lingkungan yang meliputi peta global dan peta Indonesia, disertai dengan unsur-unsur penentu yaitu unsur *continuity* dan unsur *changes*. Interaksi dimensi lingkungan dan unsur-unsur penentu tersebut

digambarkan dalam sebuah matriks yang merupakan bauran pendekatan multidisiplin. Hubungan antara dimensi lingkungan dan unsur-unsur penentu dapat dilihat dari Skema 1 di halaman 189.

Berdasarkan interaksi tersebut dua lakon Indonesia ke depan adalah pilihan menjadi lakon raksasa ASEAN yang tidak berdaya atau sebagai pusat kebangkitan masyarakat ASEAN. Mengapa ASEAN? Karena posisi geografi Indonesia yang sangat penting di dalam peta geo-politik, di dalamnya meliputi demografi dengan jumlah penduduk 240 juta, disertai sejarah masa lalu, di mana Indonesia sebagai pelopor pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Dan pada tahun-tahun sesudahnya, Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting dalam memberikan inisiatif-inisiatif kerja sama di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 merupakan upaya nyata penyatuan ekonomi kawasan yang diharapkan dapat memperbesar peran ASEAN dalam peta ekonomi dunia. Untuk itu, sangat penting melihat Indonesia ke depan dengan peluang yang diambil Indonesia di dalam perannya di kawasan ASEAN ini.

Pada lakon yang pertama sebagai lakon pesimis, ditengarai NKRI saat ini berada pada wilayah perbatasan dari kelompok "failed states". Hal ini merujuk pada berbagai indikator yang disurvei melalui *Human Development Index* (HDI) yang menempatkan Indonesia di bawah rata-rata dunia dan Asia Pasifik. PBB membagi HDI menjadi 4 kategori yaitu 1) *Very High HDI*; 2) *High HDI*; 3) *Medium HDI*; dan 4) *Low HDI*. HDI Indonesia untuk tahun 2011 tercatat sebesar 0,617 naik dari 0,60 pada tahun 2010 Indonesia, termasuk dalam kategori *Medium HDI*, tetapi ada di peringkat terendah di antara negara-negara ASEAN 5.

Posisi HDI Indonesia masih berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei, posisi tersebut bahkan dikatakan turun karena sebelumnya berada pada peringkat 108 dari 169

negara yang telah disurvei. Namun demikian, dari kurun waktu antara 1980–2011, HDI Indonesia naik dari 0,423 menjadi 0,617, meningkat 45,9% atau rata-rata naik 1,2% per tahun².

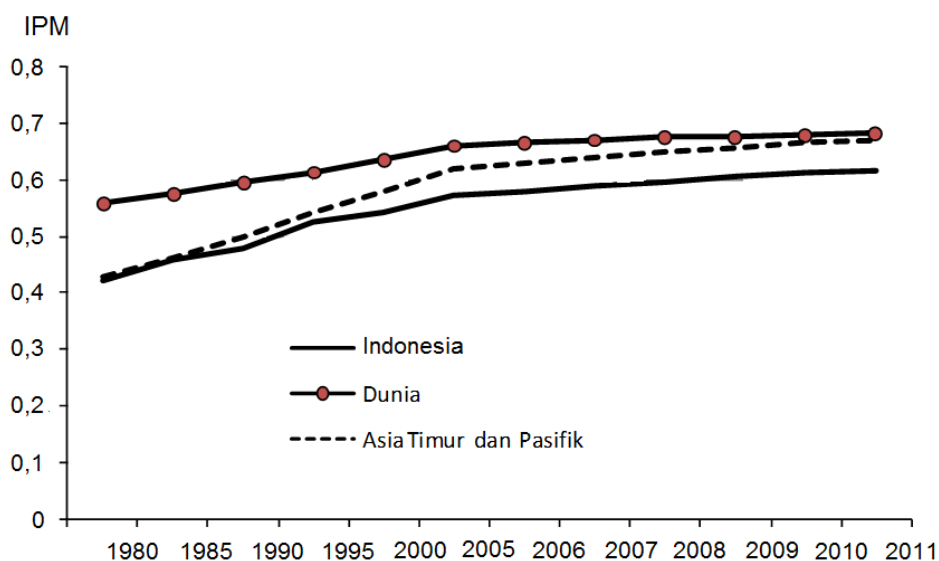
Belum lagi dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh *Transparency International* dengan semakin kentalnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Praktik KKN ini patut diwaspadai terhadap kelemahan pengelolaan wilayah NKRI yang mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Dengan demikian, praktik ekonomi rente dalam mengeksploitasi kekayaan alam berpotensi kuat merugikan kepentingan nasional NKRI.

Sejarah dunia di abad ke-19 dan 20 penuh dengan cerita praktik penjarahan kekayaan alam dalam skala besar sebagaimana dilakukan oleh negara-negara Selatan yang dilakukan lewat kolusi di antara perusahaan-perusahaan asing dengan pemerintah-pemerintah otoriter. Sebagian dari kolusi itu merupakan praktik mafia yang berpotensi menjerumuskan negara-negara yang terjerat dengan praktik-praktik itu ke posisi *failing state* atau bahkan *failed state*.

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah jika ke depan pemerintah demi pemerintah tidak berhasil menyelesaikan kemelut 3F yaitu *fuel*, *food*, dan *finance* (modal) yang biasanya muncul dalam negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia. Kemelut 3F ini sudah mulai terlihat ketika Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori *net importer* minyak, beras dan bahan makanan lainnya, termasuk juga defisit untuk permodalan (*finance*). Indonesia selama dekade kehidupannya sangat bergantung pada permodalan dari luar negeri yaitu utang.

Sejarah Indonesia juga membuktikan dikotomi 'Jawa' dan 'Luar Jawa' yang berkonotasi sebagai "*net importer*" dan "*net exporter*" dapat menjadi salah satu sumber perpecahan

²*Human Development Index*. <http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/>. (15 Maret 2012)

Gambar 4: Posisi Indonesia dalam *Human Development Index*

Sumber: UNDP - Human Development Index, 2011

yang kuat terhadap keutuhan NKRI di masa mendatang. Selama ini pembangunan fisik terkonsentrasi di pulau Jawa, sebaliknya khususnya di Kawasan Indonesia Timur (KTI) pembangunan fisik sangat tertinggal. Pembangunan tersebut membuat arus penduduk dan arus permodalan mengalir ke Jawa, di saat yang sama daya dukung Jawa juga semakin menurun.

Dengan kekuatan penduduk dalam jumlah yang besar, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang hanya bisa diperoleh dengan jaminan ketersediaan pangan yang cukup sehingga masalah *food security* dan *energy security* menjadi bagian yang sangat serius dalam penerawangan Indonesia ke masa depan dan termasuk keutuhan dari NKRI. Oleh karena itu, dalam skenario yang terburuk, Indonesia dapat menjadi negara berpostur "Raksasa ASEAN yang tak Berdaya".

Lakon kedua adalah lakon positif yaitu mempertahankan posisi penting Indonesia di tingkat regional yaitu ASEAN dengan struktur geopolitik dan demografi yang dimiliki Indonesia. Kekuatan Indonesia membangun lakon ini ter-

letak pada sumber ketahanan Indonesia yang sangat strategis yaitu masyarakat Indonesia sendiri yang dapat memelihara persatuannya terhadap tekanan-tekanan perpecahan berbasis SARA dan ideologi yang datang dari dalam dan luar. Sumber ketahanan masyarakat Indonesia terletak pada golongan menengah, serta penduduk pedalaman. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah dan kerja sama lintas batas yang semakin terbuka.

Untuk mewujudkan lakon yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh pemimpin NKRI akan semakin meningkat, semakin beragam, dan semakin bermutu. Indonesia sebagai Negara-Bangsa memiliki ciri pluralisme yang kuat sehingga masalah di masa datang bukan hanya yang berasal dari lembaga-lembaga non-pasar, nonpemerintah yang memanfaatkan teknologi jaringan-jaringan yang canggih berbasis ICT, melainkan juga dari kelompok-kelompok SARA.

Ke depan NKRI harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang menghormati

pluralisme di dalam berbagai manifestasinya. Indonesia sebagai Negara-Bangsa mempunyai kekuatan bahasa nasional yang dapat menjembatani pluralisme tersebut, ditambah dengan kemampuan memimpin yang secara efektif pada tataran lintas-SARA, tataran normatif/idealisme, tataran struktural/kelembagaan, dan tataran perilaku. Di samping itu, posisi geografi NKRI di tengah 10 negara tetangga—India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Kepulauan Pasifik, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste—serta fakta keterbukaan posisi NKRI sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia dan keberadaan utama NKRI dalam perairan internasional patut dijadikan pegangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan struktural ke depan.

Modal membangun NKRI yang komprehensif juga telah dibekali dengan otonomi daerah (otda) dengan membuka kerja sama antardaerah perbatasan. Dengan kekuatan otda ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di daerah-daerah dan lintas batas yang semakin terbuka. Peran pemerintah dalam skema *top-down* akan semakin terdesak dan digantikan dengan skema yang berbasis *bottom-up*. Peran pemerintah pusat, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan semakin lemah dan digantikan oleh kecenderungan meningkatnya peranan lembaga pasar dan dunia usaha swasta.

Peran NKRI ke depannya justru menuntut pemerintah Indonesia berperan sebagai negosiator di tingkat global serta regional, dan di tingkat bilateral dengan sejumlah negara yang penting peranannya dalam kehidupan negara dan bangsa Indonesia, serta turut aktif dalam penanganan masalah-masalah global yang terkini seperti pemanasan global, potensi epidemik dan pandemi, gangguan terorisme internasional, kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas yang membahayakan keamanan regional.

Buku ini memberi catatan, bahwa pa-

da akhirnya keberhasilan Indonesia di dalam mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya pembangunan jangka panjang akan berperan besar di dalam kestabilan ASEAN. Keberhasilan Indonesia ini merupakan peran strategis, tanpa keberhasilan ini, NKRI dikhawatirkan menjadi "The Sickman of Southeast Asia".

Tinggal Landas 2030

Tiga unsur penentu nasib Negara-Bangsa yaitu geografi, demografi, dan sejarah. Dari ketiga faktor tersebut, geografi relatif tidak berubah. Kendati demikian, isu pemanasan bumi akan menimbulkan kenaikan permukaan laut sehingga sekitar tahun 2050 diperkirakan ada sekitar 3.000 pulau di Indonesia tenggelam seperti yang kini terjadi di Republik Kepulauan Karibia yang mulai memindahkan penduduknya ke Fiji. Demografi berubah secara lambat tetapi pasti. Sementara itu, sejarah mucul seiring dengan perubahan dinamis perkembangan penduduk.

Runtunan demografi Indonesia yang dimulai dari dasawarsa 1950-an, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,5%. Pada awal abad 21 ini, tinggal 1,4% dan diperkirakan bergerak menuju 0% pada tahun 2045 atau ketika NKRI merayakan 100 tahun kemerdekaannya dengan perkiraan penduduk mencapai 350 juta jiwa. Ketika itu penduduk lansia akan menempati proporsi demografi yang terbesar. Tantangan demografi inilah yang menunjukkan jika NKRI mau tinggal landas, maka kesempatan tersebut ada pada periode antara tahun 2010 sampai dengan 2035 atau 2040 atau maksimal 2045.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam teori pertumbuhan Rostow, setiap Negara-Bangsa yang masuk ke tahap pembangunan selalu menghadapi *structural limit*, ditunjukkan oleh pergerakan kurva S. Apabila masyarakat Negara-Bangsa tersebut tidak mampu menghadapi masalah *limit* yang mun-

cul dalam parameter tersebut dan mengubahnya, maka kegiatan akan kembali terancam stagnasi. Semacam keadaan krisis atau *inflection point* akan muncul disini. Sebaliknya, jika hambatan tersebut berhasil ditangani penyelesaiannya dengan sukses, maka kegiatan masyarakat tersebut akan bergerak memasuki wilayah pertumbuhan berikutnya. Ke wilayah kurva S ke-2. Di sini, apa yang dialami pada kurva S ke-1 akan muncul lagi, yakni sampai kepada saat hambatan ke-2 muncul, dan sebuah keadaan krisis yang baru kemudian terjadi. Demikian seterusnya.

Di dalam kegiatan pembangunan ekonomi, periode yang diperlukan untuk perjalanan dari sebuah perencanaan bergerak dari satu tahap ke tahapan berikutnya dapat mencapai 3–4 repelita. Selain itu, ada 2–3 hambatan besar yang berpotensi muncul dan mengacaukan kesinambungan pembangunan. Biasanya hambatan ke-1 berupa masalah kekurangan modal. Hambatan ke-2 muncul dari kurangnya prasarana, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Hambatan ke-3, yang termasuk paling sulit adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik.

NKRI sempat mengalami kondisi pratinggal landas pada dekade 1990-an, tetapi hambatan struktural yang muncul dalam bentuk krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998 tidak memungkinkan NKRI masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya ke kurva S ke-2. Dengan demikian, peluang memasuki tahapan pembangunan berikutnya ada pada periode antara tahun 2025–2045 tersebut. Momentum ini sangat penting untuk mewujudkan NKRI sebagai lakon yang kedua, yaitu pusat kebangkitan ASEAN. Semua negara berkepentingan Indonesia yang maju dan modern.

Untuk dapat memasuki tahapan pertumbuhan selanjutnya yang digambarkan oleh teori Rostow tersebut, NKRI harus membangun secara menyeluruh, tidak hanya fokus di Jawa. Syarat untuk tinggal landas dimulai dengan membuat sistem pemerintahan yang efektif,

kemudian sistem ekonomi. Namun sayangnya, kendati sudah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33, tetapi Koefisien Gini dalam beberapa dasawarsa belum beranjak dari 0,33, yaitu artinya ketimpangan pendapatan masih lebar. Ditambah dengan tidak jelasnya rumus perimbangan antara sistem pasar dan negara.

Di masa depan dengan penerawangan sampai sejauh-jauhnya 2030, para pemimpin NKRI akan dihadapkan pada pemangku kepentingan yang jumlahnya semakin meningkat, semakin beragam, dan semakin bermutu. Dengan demikian, pemanfaatan bahasa Indonesia disertai kemampuan berteknologi (ICT) yang semakin meluas membuat potensi para pemangku kepentingan akan semakin meningkat menandingi kemampuan pemerintah. Pola bersaing akan makin ketat dan makin asimetris yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memenangkan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, bisnis, bahkan ideologi dan SARA. Ke depannya dibutuhkan pemimpin NKRI yang mampu menjaga pluralisme berkekuatan bahasa nasional yang harus dapat mengefektifkan berbagai kepentingan tersebut.

Kehidupan Negara-Bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan melibatkan banyak pelaku menuntut adanya pemahaman tentang risiko kehidupan bernegara dan berbangsa yang muncul dari perubahan-perubahan yang –pada waktu ini– dilihat sebagai ”tidak mungkin terjadi”.

Kesimpulan: Mau Kemana Kita

Pada bagian kesimpulan ini, penerawangan Indonesia 2030 tidak dapat dilepaskan dari 3 unsur utama yang menjadi diktum kebangkitan Negara-Bangsa yaitu Geografi, Demografi, dan Sejarah. Ketiganya dimiliki oleh NKRI sebagai kekuatan yang sudah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan, dan masih akan valid untuk melakukan penerawangan Indonesia tersebut. Tiga kekuatan tersebut harus menjadi pertimbangan para pemimpin di masa depan sehingga pertumbuhan jangka panjang menjadi jamin-

an tetap terwujudnya NKRI. Masalah-masalah yang muncul terkait ketiga diktum tersebut seperti perubahan geografi, masalah *food security* dan *energy security* yang sangat strategis untuk menjamin kehidupan dari 350 juta penduduk ke depan, disertai dengan semangat kebangsaan dengan makin berperannya potensi-potensi daerah akan membuat pemimpin NKRI di masa depan harus mengembangkan pluralisme berbasis bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu.

Dalam peranan strategisnya, NKRI akan dihadapkan pada dua lakon pilihan, yaitu pilihan sebagai negara berpenduduk besar yang tidak berdaya di kawasan ASEAN atau justru menjadi kekuatan di kawasan ASEAN dengan posisi strategisnya tidak hanya secara geografi, tetapi juga demografi dan peran Indonesia sebagai anggota aktif dan penting di lingkungan kawasan ASEAN. Posisi strategis NKRI menjadi sangat penting di kawasan ASEAN dan di dunia sebagai penjaga stabilitas terkait dengan isu terorisme global. Terjaganya NKRI menjadi kebutuhan keamanan tidak hanya di tingkat kawasan, tetapi juga di tingkat global.

Kesempatan Indonesia untuk tinggal landas pada 2030 merupakan kesempatan kedua yang sebelumnya sempat terjadi di dekade 1990-an, kandas ketika Indonesia terkena krisis Asia tahun 1998. Krisis tersebut diharapkan membuat Indonesia berada pada fase pertumbuhan yang lebih tinggi karena krisis semestinya merupakan koreksi untuk tumbuh lebih baik dan bukan merupakan proses degenerasi. Kendati ada indikasi NKRI berada pada batas yang dianggap sebagai *failing state*, namun kekuatan strategis NKRI terkait dengan 3 diktumnya merupakan peluang bagi NKRI untuk memilih lakon kedua.

Buku ini juga menunjukkan bahwa dalam sejarahnya NKRI selalu dihadapkan pilihan "ini" atau "itu" yang kemudian cenderung memilih melakukan keduanya. Pilihan tersebut dianggap terbaik, tetapi mengindikasikan adanya ketidaktegasan dari pengambilan keputusan.

an. Dua lakon yang diperkirakan muncul ke depan mengenai NKRI cukup mengkhawatirkan karena sejauh ini perhatian-perhatian kebijakan pemerintah di sisi sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan masih belum maksimal kendati telah dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran (APBN) untuk pendidikan.

Dalam perspektif keseimbangan makro, pembangunan SDM yang berkualitas menuntut pemerintah bekerja di tataran penawaran agregat (*aggregate supply*). Membangun SDM tidak terlalu menarik bagi pemerintahan yang berpikir jangka pendek karena keberhasilannya tidak terlihat oleh konstituennya sekarang. Tanpa SDM yang berkualitas, bonus demografi tampaknya akan sia-sia bahkan menjadi ancaman ketika pemerintah tidak cukup berhasil memberikan jaminan makanan dan energi. Tahun 2030 masih sekitar 18 tahun mendatang atau sekitar 4 pemerintahan lagi, tetapi proses menuju ke sana semestinya sudah dilakukan sekarang jika kita mau NKRI tinggal landas dan tidak menjadi *the failed states*. Akan tetapi bukan tidak berarti peluang tinggal landas tersebut tidak bisa tercapai. Pembangunan SDM yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan bonus demografi tersebut. Terima kasih untuk Pak Jatun yang telah mengingatkan kita.